

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang dimaksud meliputi semua aspek keuangan, di mana di dalamnya terdapat pengelolaan gaji pegawai, Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan pegawai yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri dan di gaji berdasarkan peraturan perundang-undang. Sedangkan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) .seperti yang kita ketahui PPNPN merupakan pegawai tidak tetap yang dibayarkan oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) keduanya telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2020 Tentang tata cara pembayaran penghasilan bagi pegawai pemerintah non pegawai

negeri yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, secara lebih lanjut menjelaskan bahwa penghasilan PPNNP dibayarkan setiap bulan sesuai dengan surat keputusan/perjanjian kerja/kontrak dan/atau peraturan perundang-undangan. Diuraikan juga mengenai definisi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNNP) yaitu pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBN. PPNNP dibagi menjadi dua jenis meliputi:

1. PPNNP yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang diberi yang diberi kuasa dari Pejabat Pembina Kepegawaian dengan surat keputusan dalam rangka pemenuhan kebutuhan organisasi atau formasi jabatan dari pelaksana umum sampai pimpinan tinggi, yang meliputi antara lain :
 - a) Wakil Menteri yang berasal dari non pegawai negeri;
 - b) PPPK;
 - c) Hakim *ad hoc* yang berasal dari non pegawai negeri;
 - d) Staf khusus pada Kementrian Negara/Lembaga;
 - e) Komisioner/Pegawai non pegawai negeri pada lembaga nonstructural;
 - f) Dokter/Bidan PTT;
 - g) Dosen/Guru tidak tetap; atau
 - h) PPNNP lainnya yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang penghasilannya bersumber dari APBN.
2. PPNNP berdasarkan perjanjian kerja/kontrak dengan KPA/PPK dalam rangka pengadaan barang/jasa secara langsung kepada perseorangan / yang tidak melalui pihak ketiga, yang meliputi:

- a) Tenaga Ahli/Konsultan untuk memenuhi kebutuhan jasa penelitian/konsultasi pada kementerian negara/lembaga;
- b) Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti pada Satker yang memenuhi perjanjian/kontrak dengan KPA/PPK untuk melaksanakan kegiatan operasional kantor;
- c) PPNPN lainnya yang membuat perjanjian kerja/kontrak dengan KPA/PPK dalam rangka pengadaan barang/jasa yang penghasilannya bersumber dari APBN.

Sesuai dengan pembahasan yang akan diangkat pada Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini mengenai siklus penggajian Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dalam kaitannya pada sistem informasi akuntansi. Dengan jumlah pegawai yang cukup besar dan menyangkut tidak hanya satu subbagian yang mengelola. Oleh karena itu dirasa perlu adanya konfigurasi sistem yang baik dan efisien agar kegiatan operasional pada satuan kerja dapat berjalan dengan lancar serta mencapai kata efisien.

Dengan adanya sistem yang baik dapat membuat segala sesuatu akan lebih mudah, cepat, dan akurat. Pada dasarnya, sistem terdiri dari sejumlah subsistem yang terintegrasi dalam suatu skema terpadu yang disusun untuk menyelesaikan suatu kegiatan utama perusahaan seperti penjualan, pembelian, dan produksi (Kaelani, 2019). Sistem informasi Akuntansi yang dirancang dengan baik akan menghasilkan informasi keuangan yang akurat, handal dan akuntabel sehingga memudahkan perancang kebijakan dalam pengambilan keputusan.

Menurut Romney dan Steinbart (2014) , sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Sistem ini meliputi orang, prosedur dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, serta pengendalian internal dan keamanan. Sistem informasi akuntansi penggajian menurut (Mulyadi, 2014) adalah sistem yang dirancang untuk menangani transaksi gaji dan upah karyawan dan pembayarannya.

Sedangkan pentingnya sistem informasi penggajian menurut Nadief Kaelani (2019) disebabkan oleh beberapa pertimbangan, Pertama volume kegiatan dan catatan yang harus di proses sangat besar sehingga risiko kesalahan juga besar dalam sistem penggajian, Kedua sifat kegiatannya sangat sensitif dan dapat menghambat kegiatan perusahaan Karyawan mudah marah apabila gaji tidak dibayar tepat waktu, atau menerima kurang dari yang seharusnya, Ketiga menyangkut ketaatan terhadap ketentuan perundangundangan, karyawan akan protes bila kebijakan gaji (dan upah) perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah, seperti ketentuan Upah Minimum Regional. Karyawan tidak puas bisa melakukan mogok kerja yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Dalam mengelola belanja pegawai yang jumlahnya besar, sistem informasi akuntansi penggajian dapat ikut berperan sehingga penerapannya menjadi lebih sistematis.

Sistem informasi akuntansi akan menghasilkan informasi bagi pengambilan keputusan mengenai hasil pelaksanaan perubahan anggaran belanja penggajian dari instansi atau perusahaan pada tingkat yang rendah hingga tingkat pusat, sehingga

sistem informasi akuntansi akan menghasilkan informasi bagi instansi atau perusahaan mengenai hasil pelaksanaan perubahan anggaran. (Widayanti, 2017).

Salah satu tujuan dari sistem informasi akuntansi adalah untuk memperbaiki sistem pengawasan dan sistem pengendalian internal. Pengendalian intern adalah suatu proses yang dituangkan dalam suatu kebijakan dan atau prosedur sebagai suatu alat untuk menjamin tercapainya tujuan suatu organisasi melalui terselenggaranya kegiatan operasional yang efektif dan efisien, tersajinya laporan keuangan yang akuntabel dan andal, dipatuhinya peraturan perundangundangan dan adanya pengamanan aset. Pengendalian intern diharapkan dapat mencegah terjadinya tindakantindakan penyelewengan yang merugikan organisasi. Penerapan sistem pengendalian internal pada pemerintahan menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pembina sistem pengendalian intern nasional dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dimasing-masing instansi pemerintahan dihasilkan fakta bahwa sebagian besar masih dibawah level tiga dengan karakteristik belum ada/ rintisan/ masih berkembang. (Omposunggu, 2019).

Sehingga sistem pengendalian internal ini berdampak pada laporan keuangan, dimana terdapat pengaruh signifikan antara Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan terhadap Kualitas Laporan Keuangan secara simultan. (Herawati, 2014)

Melihat urgensi terhadap sistem kepegawaian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan pembahasan melalui tinjauan atas siklus penggajian Pegawai

Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta. Dengan menitikberatkan bahasan pada kaitan sistem informasi akuntansi terhadap siklus penggajian pegawai untuk Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “Tinjauan Atas Sistem Informasi Akuntansi Siklus Penggajian Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta. (Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2016).

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan siklus penggajian Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta;
2. Apakah terdapat kesesuaian antara teori yang sudah penulis pelajari selama perkuliahan dengan penerapannya pada siklus penggajian Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta;
3. Bagaimana sistem pengendalian internal pada siklus penggajian Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diantaranya untuk:

1. Untuk mengetahui penerapan Siklus Penggajian pada Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta.
2. Untuk menganalisis kesesuaian antara teori yang telah didapat penulis selama perkuliahan dengan praktik sebenarnya terhadap penerapan Sistem Informasi Akuntansi atas Siklus Penggajian pada Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta.
3. Untuk meninjau implementasi pengendalian internal yang diterapkan dalam siklus penggajian pada Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta.
4. Untuk mengetahui kekuatan dan kekurangan pengendalian internal dari penerapan Siklus Penggajian pada Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta. Serta menyusun saran-saran perbaikan dari sistem pengendalian tersebut.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup pada Karya Tulis Tugas Akhir ini hanya terbatas pada Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Soekarno Hatta di Kecamatan Benda, Kota Tangerang sebagai lokasi dalam pengambilan data, dimana data yang diambil pada periode anggaran 2021. Ruang lingkup ini membahas mengenai penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam siklus penggajian Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta. Penulis menyadari urgensi terhadap implementasi Sistem

Informasi Akuntansi (SIA) yang tepat pada siklus penggajian pegawai sehingga menghasilkan pelaporan keuangan yang relevan.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Bagi Pembaca

Dari penulisan KTTA ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan Sistem Informasi Akuntansi dalam siklus penggajian pegawai pada unit organisasi pemerintahan, khususnya pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta .

2. Manfaat Bagi Penulis

Dari penulisan KTTA ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis mengenai pemahaman dalam praktik siklus penggajian secara langsung di lapangan dan memperluas teori-teori mengenai sistem informasi akuntansi khususnya siklus penggajian pada unit organisasi pemerintahan dan menambah pengalaman penulis dalam menyusun sebuah karya tulis.

3. Manfaat Bagi Objek Penulisan

Dari KTTA ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam pengembangan Sistem Informasi Akuntansi terutama implementasinya terhadap siklus penggajian di Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta untuk tahun anggaran selanjutnya guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis memberikan gambaran secara umum mengenai Karya Tulis Tugas Akhir yang disusun. Gambaran umum yang dimaksud adalah latar belakang penulisan, rumusan masalah penulisan, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, manfaat penulisan, metode di bab 3, dan sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi teori berkaitan dengan tinjauan atas dasar-dasar teori mengenai Sistem Informasi Akuntansi pada siklus penggajian yang digunakan sebagai landasan untuk membahas topik tersebut dalam proses penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir. Landasan teori tersebut meliputi definisi sistem informasi akuntansi, sistem informasi akuntansi penggajian, fungsi terkait sistem informasi penggajian, dokumen yang digunakan, prosedur untuk membentuk sistem, dan pengendalian internal terkait sistem informasi akuntansi penggajian. Dari landasan teori yang telah disebutkan akan dikaitkan pada implementasi sistem informasi akuntansi atas siklus penggajian Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi penjabaran mengenai metode pengumpulan data, gambaran umum di Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta, dan pembahasan hasil dari pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan penulis atas siklus penggajian Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta, dengan berdasarkan pada landasan teori pada bab sebelumnya. Serta menjelaskan gambaran umum Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta berisi sejarah, visi dan misi Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta, tugas dan fungsi, serta struktur organisasi yang ada di Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta. Pada bagian pembahasan, penulis akan menguraikan mengenai tinjauan penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada siklus penggajian tahun anggaran 2021. Dari pembahasan ini diharapkan dapat mengetahui kekurangan dari sistem pengendalian atas siklus penggajian di KPPN Purwodadi. Sehingga penulis dapat memperkirakan dampak potensial dari adanya kelemahan dan dapat memberikan rekomendasi solusi yang tepat untuk memperbaiki hal tersebut.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini berisi kesimpulan yang didapat oleh penulis atas peninjauan terhadap keterkaitan antara teori dengan implementasi di lapangan. Dan dapat memberikan saran atau masukan perbaikan yang mungkin dapat dijadikan bahan referensi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Sistem Informasi Akuntansi

khususnya pada siklus penggajian Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta.